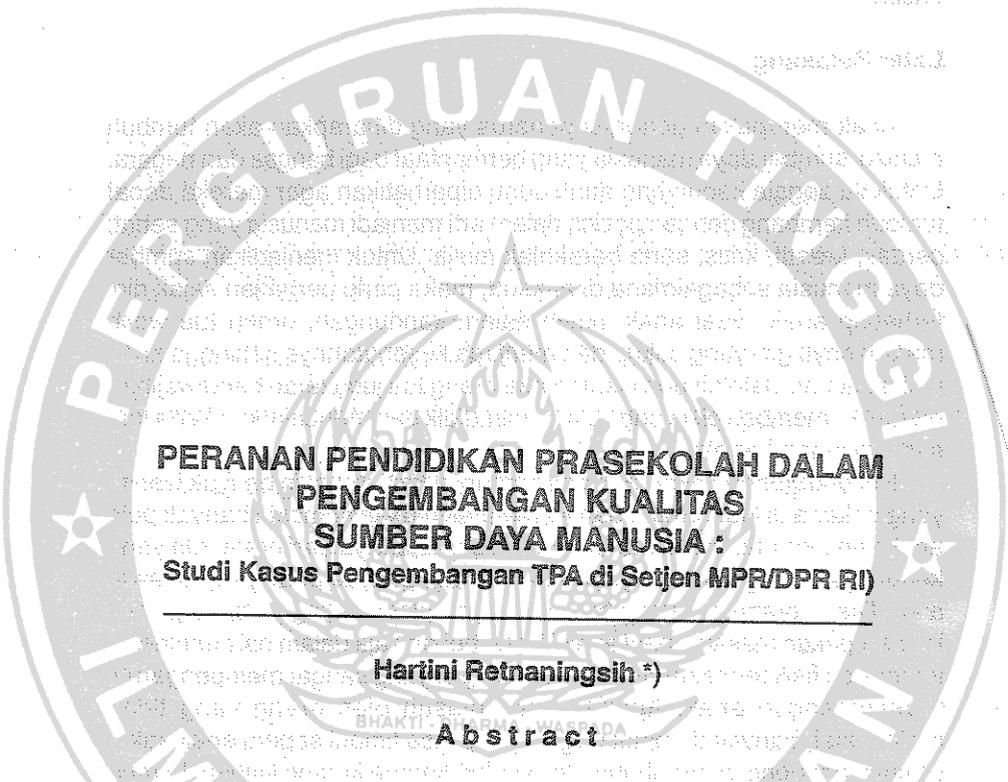


**KESEJAHTERAAN SOSIAL**



**PERANAN PENDIDIKAN PRASEKOLAH DALAM  
PENGEMBANGAN KUALITAS  
SUMBER DAYA MANUSIA :  
Studi Kasus Pengembangan TPA di Setjen MPR/DPR RI)**

**Hartini Retnaningsih \*)**

**Abstract**

*Pre-elementary school education is carried out to give children a basic for the development of attitude, knowledge, skill, and creativity, before entering their elementary school. In pre-elementary school-age, children are at their best time to get good impulse and motivation, so that their basic ability can be developed well. Nowadays, one of the problem faced by parents, especially if they have career, is that they have no time to give their "Children under five years" full attention. Based on that reason above, the Scretariat General of the House of Representatives of Indonesia has been planning to establish "Children Entrusting Place" to enable parents entrust their children while they are working in the office. However, the result of the research showed that the officers of Scretariat General of the House of Representatives of Indonesia did not give good and serious attention to use the facility of "Children Entrusting Place"*

\*) Penulis adalah Asisten Peneliti Muda di P31 Setjen DPR RI, alumnus Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang tahun 1990

*well, although they realize the importance of pre-elementary school education.*

## Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus yang diharapkan akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Untuk itu segala kebutuhan anak perlu diperhatikan agar mereka dapat tumbuh kembang dengan positif, dalam arti menjadi manusia yang sehat, cerdas, kreatif, kritis, serta berakhlak mulia. Untuk menjadikan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud, maka perlu perhatian sejak dini terhadap anak. Saat anak masih dalam kandungan, orang tua wajib memberinya gizi yang cukup dan menjaga kesehatannya sehingga anak lahir selamat. Setelah anak lahir maka orang tua juga tetap berkewajiban merawat, memberi gizi yang cukup, mendidik dan mengajarkan kebaikan serta mengembangkan bakat dan minatnya.

Kecenderungan akhir-akhir ini menunjukkan semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah, dan ini mengakibatkan semakin banyak pula anak yang kurang mendapat perhatian sepenuhnya dari orang tua yang keduanya bekerja. Akibatnya, akan semakin banyak anak yang dirawat atau diasuh orang lain yang bukan ibunya selama ditinggal bekerja. Hal ini merupakan masalah bagi anak Balita, bukan saja dalam hal pendidikan tetapi juga fisik termasuk kesehatan dan gizi yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Apabila anak diasuh oleh orang yang tidak profesional, banyak dampak negatif yang bisa timbul seperti anak sakit-sakitan, cengeng, pertumbuhan terhambat karena kurang latihan, kurang gizi, dan lain sebagainya.

Dampak lain dari semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah adalah semakin maraknya bisnis pengasuh bayi dan pembantu rumah tangga, terutama di kota-kota besar. Bagi keluarga kelas atas mungkin pengasuh bayi atau pembantu rumah tangga tidak begitu menjadi masalah karena mereka mampu membayar, bahkan juga bila terpaksa berganti-ganti tenaga. Namun bagi keluarga kelas menengah ke bawah, pengasuh bayi dan pembantu rumah tangga sering menjadi masalah besar. Pemicu permasalahannya adalah gaji dan kesungguhan para pengasuh bayi atau pembantu rumah tangga dalam bekerja. Selain masalah yang bisa timbul dari tenaga pengasuh bayi atau pembantu rumah tangga itu sendiri, juga semakin banyak munculnya perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Perusahaan penyalur menentukan tarif tertentu untuk tebusan dan gaji tenaga yang disalurkan. Permasalahan lain, seringkali perusahaan penyalur menggunakan segala dalih untuk memindah-mindahkan tenaga yang disalurkan demi memperoleh

keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini merugikan konsumen karena tenaga pengasuh/pembantu memutuskan hubungan kerja dalam waktu singkat.

Di kota besar pengasuh bayi sangat diperlukan oleh wanita yang bekerja di luar rumah. Kalau tak ada pengasuh bayi disamping pembantu rumah tangga maka pembantu rumah tangga pun bisa dimanfaatkan untuk mengasuh bayi atau anak Balita, meskipun dengan risiko pekerjaan lain akan terlantar. Hal ini sudah biasa bagi keluarga yang ekonominya pas-pasan. Selain itu juga banyak keluarga yang karena kesulitan mencari pembantu rumah tangga maka anak Balitanya ditiptikan ke sanak famili ataupun tetangga, walaupun ini tidak berlaku umum, tergantung dari kondisi lingkungan sosial masyarakatnya. Di lingkungan tertentu yang masih ada hubungan baik antar tetangga maka orang bisa menitipkan anaknya ke tetangga. Namun di lingkungan tertentu lainnya seperti perumahan mewah atau apartemen misalnya, sangat kecil kemungkinan orang untuk menitipkan anaknya ke tetangga.

Pengasuh bayi atau pembantu rumah tangga sering menjadi masalah bagi wanita yang bekerja di luar rumah. Permasalahan bukan hanya terletak pada semakin sulitnya mendapatkan tenaga yang berkualitas, namun juga susahny mengajari mereka untuk bekerja dengan baik dan benar. Semakin banyaknya wanita yang bekerja di luar rumah menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan efek negatif pengasuh bayi atau pembantu rumah tangga terhadap perkembangan anak. Ketakutan tersebut memang berdasar, karena siapapun tak ingin terjadi kesalahan dalam pembentukan sumber daya manusia. Jadi yang harus diperhatikan adalah masalah pendidikan bagi anak Balita atau anak prasekolah, ini menjadi tantangan bagi orang tua khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Karena itu Tempat Penitipan Anak (TPA) merupakan salah satu wadah penting untuk pembinaan anak Balita yang kedua orang tuanya bekerja di luar rumah, dimaksudkan untuk membantu mengatasi permasalahan pendidikan anak sejak dini.

Di Setjen MPR/DPR RI, rencana pendirian TPA selain dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai juga untuk memotivasi peningkatan efisiensi sumber daya manusia. Dengan adanya TPA diharapkan para pegawai (terutama pegawai wanita) bisa bekerja dengan tenang tanpa ada rasa khawatir atas keselamatan dan pertumbuhan serta perkembangan anak Balitanya karena anak-anak mereka diasuh oleh orang-orang profesional. Dengan adanya TPA diharapkan para pegawai bisa bekerja dengan efisien dan efektif serta berkualitas.

## **Permasalahan**

Kesadaran terhadap arti penting pendidikan pra-sekolah bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu didukung oleh sarana penunjang yang dapat mengarahkan proses pendidikan anak. Disamping itu, urgensi penyiapan sarana penunjang makin terasa mengingat aktualitas peranan wanita yang makin mengarah di sektor publik. Karena itu pendirian TPA sangat diperlukan, namun apakah kondisi di Setjen MPR/DPR RI memungkinkan untuk didirikan TPA tersebut ?

## **Tujuan**

Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk mengetahui sikap dan minat pegawai Setjen MPR/DPR RI terhadap TPA.

## **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam studi kasus ini adalah : (1) Studi kepustakaan tentang pentingnya pendidikan prasekolah; (2) Penelitian terhadap data KP-4 yang diperoleh dari Bagian Kepegawaian Setjen MPR/DPR RI; (3) Penelitian lapangan melalui kuesioner terhadap pegawai Setjen MPR/DPR RI, dimana sampel diambil secara random; (4) Melakukan analisa baik kualitatif maupun kuantitatif terhadap ketiga studi tersebut di atas.

## **Kerangka Teori dan Pola Pikir**

Titik tolak pemikiran akan pentingnya pendidikan prasekolah adalah PP No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah. Pasal 1 ayat 1 PP tersebut menyatakan : Pendidikan Prasekolah adalah pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan sekolah atau di jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan pasal 4 menyebutkan bahwa bentuk satuan pendidikan prasekolah meliputi Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Penitipan Anak, dan bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri.<sup>1)</sup>

Dalam penjelasan umum PP tersebut juga diuraikan, pendidikan prasekolah diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta di luar lingkungan keluarga bagi anak usia sebelum memasuki pendidikan dasar.

1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990

Usia tersebut merupakan usia yang sangat menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam masa ini anak tersebut berada pada usia peka untuk menerima rangsangan yang cukup baik, terarah, dan didorong ke tingkat pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga diharapkan kemampuan dasar anak didik dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar. Oleh karena itu pendidikan dini bagi anak usia prasekolah cukup penting dan sangat menentukan di kemudian hari.<sup>2)</sup>

Pendidikan prasekolah diharapkan akan menjadi lingkungan sosial yang mendukung pembentukan kepribadian anak, serta membantu tumbuh kembang anak dalam rangka menuju manusia dewasa yang baik dan berkualitas. Pengaruh lingkungan sosial terhadap manusia dikemukakan Charles Zastrow dan Karen K. Kirst-Ashman dalam buku "*Understanding Human Behavior and the Social Environment*" sebagai berikut :

*"The social environment involves the condition, circumstances, and human interactions which encompass human beings. Persons are dependent on effective interactions with this environment in order to survive and thrive. The social environment includes the type of home a person lives in, the type of work that's done, the amount of money available, and the laws and social rules that must be lived by. The social environment also includes all the individuals, groups, organizations, and systems with which a person comes into contact".*<sup>3)</sup>

Kedua pakar tersebut mengemukakan "The Behavior Dynamics Assessment Model" untuk memahami perilaku manusia". Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku manusia digambarkan sebagai berikut :<sup>4)</sup>

Pentingnya pendidikan sejak dini juga disebut dalam GBHN 1993, poin F butir ke-11 tentang arah pembangunan pendidikan pada PJP II yang menyebutkan :

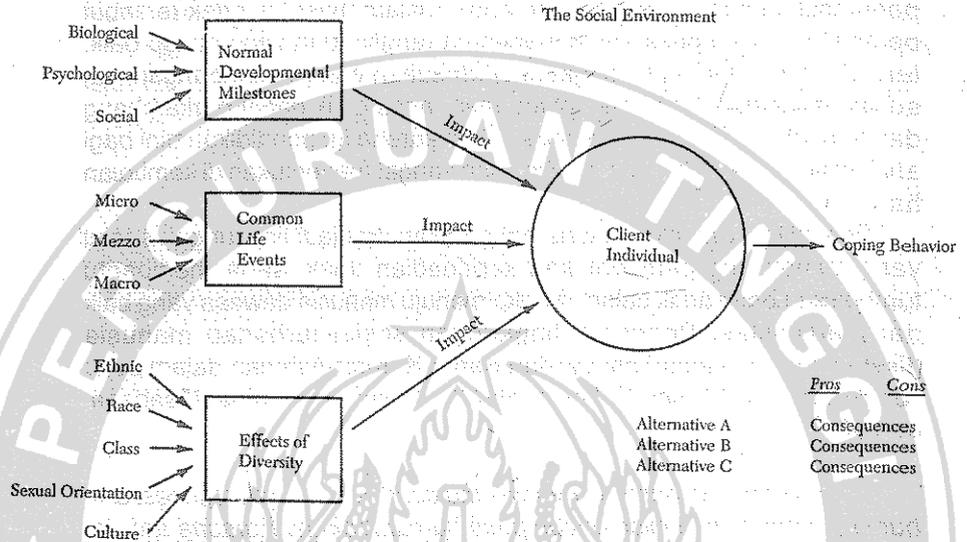
---

2) Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990

3) Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Asham, *Understanding Human Behavior and the Social Environment*, Nelson - Hall Publishers / Chicago, 1989, p. 8.

4) *Ibid*, p. 12

Figure 1.1 The Behavior Dynamics Assessment Model



“Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia serta kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperluas serta meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan termasuk di daerah terpencil. Peningkatan kualitas pendidikan harus dipenuhi melalui peningkatan kualitas dan kesejahteraan pendidik serta tenaga kependidikan lainnya, pembaharuan kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan zaman dan tahapan pembangunan, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pendidikan yang berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan sedini mungkin merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, peran aktif masyarakat dalam semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan perlu didorong dan ditingkatkan”.<sup>5)</sup>

Hal yang penting dicamkan dari kutipan di atas adalah tentang peningkatan kualitas pendidikan sesuai dengan tuntutan zaman, selain juga tanggung jawab atas pendidikan seumur hidup yang dilaksanakan sejak dini oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah. Hal ini perlu diperhatikan secara khusus mengingat era globalisasi yang sebentar lagi akan dihadapi pula oleh bangsa Indonesia.

Masalah anak saat ini bukan saja merupakan urusan nasional suatu

5) Garis-garis Haluan Negara Tahun 1993

bangsa, namun telah menjadi urusan internasional. Dalam Mukadimah Keppres RI No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Right of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) disebutkan, demi perkembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya, anak harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian. Selain itu Deklarasi Hak-hak Anak juga menyebutkan, bahwa anak karena ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan hukum yang layak, sebelum dan sesudah kelahiran. Karena itu Konvensi tentang Hak-Hak Anak mengakui pentingnya kerja sama internasional untuk peningkatan taraf kehidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara berkembang.<sup>6)</sup>

Dengan demikian jelas bahwa memberikan pendidikan sejak dini kepada anak merupakan hal yang penting untuk dilakukan demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak menyebutkan: (1) Kelompok bermain adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak yang berusia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar; (2) Penitipan anak adalah wadah pembinaan usaha kesejahteraan anak yang orang tuanya bekerja/mencari nafkah sehingga tidak berkesempatan menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha kesejahteraan anak pada waktu mereka bekerja/mencari nafkah dan juga menyelenggarakan pendidikan prasekolah bagi anak usia 3 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Tujuan pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak adalah membantu orang tua/wali untuk menyelenggarakan usaha kesejahteraan anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak.

Persyaratan untuk pendirian Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak antara lain : (1) Ada anak didik; (2) Mempunyai tenaga yang mampu berfungsi sebagai Pimpinan, Tata Usaha, Pekerja Sosial, Pembimbing/Pengasuh/Perawat, Pendidik/Guru (khusus bagi anak yang berusia 3 tahun ke atas), dan tenaga bantu. Selain itu Kelompok Bermain dan Tempat Penitipan Anak juga harus mempunyai program Usaha Kesejahteraan Anak, memiliki sarana dan prasarana yang cukup, mendapat rekomendasi Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II setempat atau pejabat yang ditunjuk, serta bersedia menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial bagi anak yang orang tuanya tidak mampu.<sup>7)</sup>

6) Keppres RI No. 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention on The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak)

7) Surat Keputusan Menteri Sosial RI No : 47/ HUK/ 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

Dalam Buku Pedoman Tata Cara Pengembangan dan Pengelolaan Taman Penitipan Anak di Wilayah DKI Jakarta, disebutkan bahwa kebutuhan pokok bagi perkembangan kepribadian anak Balita dilatarbelakangi oleh : (1) Kenyataan yang terdapat dalam masyarakat bahwa setiap orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh dan berkembang menjadi anak yang cerdas dan terampil; (2) Menurut ahli pendidikan, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan upaya agar anak menjadi cerdas dan terampil ialah apabila anak memperoleh pengalaman sendiri melalui permainan; (3) Namun disamping itu masih banyak faktor-faktor lain yang akan memberikan kesempatan tumbuh dan kembangnya kepribadian Balita menuju kepada yang diharapkan. Diantaranya yaitu tubuh yang dijaga kesehatannya, pemberian gizi yang seimbang, adanya bimbingan dan perlindungan yang sehat dari orang tua; (4) Dengan semakin berkembangnya masyarakat modern dewasa ini semakin diperlukan pula pembinaan mental sejak dini, sebagai perimbangan keadaan dan ketahanan mental generasi muda; (5) Secara resmi Pemerintah telah mencanangkan, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, bahwa Pembinaan Balita sedini mungkin amatlah penting dan akan sangat menentukan di kemudian hari; (6) Oleh karenanya maka dalam rangka upaya menumbuhkan dan mengembangkan kepribadian anak asuh TPA ke arah yang diharapkan seyogyanya TPA ditangani secara konsepsional, sistematis, dan serius.<sup>8)</sup>

Keberadaan TPA bisa mendukung penanaman nilai-nilai Pancasila terhadap anak sejak dini. Sebagaimana dikemukakan oleh Al. Purwo Hadiwardoyo dalam tulisan berjudul "Nilai Kemanusiaan Hikmat Bagi Pendidikan" yang disunting oleh EM. K. Kaswardi dalam buku berjudul "Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000", bahwa perlu hati yang penuh cinta dan bebas dari kedengkian bagi pemahaman dan pengembangan penghayatan nilai-nilai. Karena itu, pendidikan hanya berhasil dalam suasana keterbukaan dan cinta. Dalam suasana tertutupan dan kedengkian, para pendidik hanya akan mampu menyampaikan informasi rasional dan gagal untuk menanamkan nilai-nilai. Itu berarti, hubungan baik antara pendidik, anak didik serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam pendidikan, sungguh perlu bagi berhasilnya usaha menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai.<sup>9)</sup>

TPA sebagai wahana pendidikan dini juga membantu pembentukan kepribadian anak dan akan memberi dukungan pada Pokok-pokok Kebijaksanaan Pembinaan Generasi Muda sebagaimana dikemukakan B. Simandjuntak dan I.L. Pasaribu dalam buku "Membina dan Mengem-

8) Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Sosial DKI Jakarta tentang Pedoman Tata Cara Pengembangan dan Pengelolaan Taman Penitipan Anak di Wilayah DKI Jakarta, hal 2 - 3

9) EM, K. Kaswari (Penyunting), Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000, Komisi Pendidikan KWI/MPK dan Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1993, hal 46

bangkan Generasi Muda": (1) Pembinaan generasi muda harus mampu menjamin pertumbuhan dan perkembangan generasi muda sebagai sumber manusia muda ("*young human resources*") atau sebagai sumber tenaga kerja potensial ("*potential man-power*") yang cakap dan trampil serta mempunyai imajinasi dan daya trap untuk berkarya pada khususnya/ dan melakukan pembangunan nasional pada umumnya; (2) Pembinaan generasi muda harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan dan kemajuan-kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi yang berlangsung dan berpengaruh terhadap perubahan-perubahan tuntutan kebutuhan bagi pertumbuhan dan perkembangan generasi muda; (3) Pembinaan generasi muda pada hakekatnya mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan manusia remaja dengan segala kebutuhan-kebutuhannya yang saling bertautan yang perlu dipenuhi secara wajar dan memadai. Oleh karenanya pembinaan generasi muda harus dilaksanakan secara integral dan komprehensif dengan memperhatikan aspek manusianya; (4) Tanggung jawab dan tugas pembinaan generasi muda tidak hanya terletak pada Pemerintah saja, tetapi juga - dan terutama - terletak pada masyarakat, pada lembaga pendidikan formal atau sekolah dan pendidikan non formal, pada keluarga dan pada generasi muda sendiri. Dengan demikian, generasi muda itu sendiri tidak hanya berkedudukan sebagai obyek yang dibina, melainkan juga sebagai subyek yang membina diri mereka sendiri; (5) Mengingat urgensinya pembinaan generasi muda bagi masa depan bangsa dan negara, maka sudah sewajarnya apabila pembinaan generasi muda secara integral dan komprehensif tersebut dimasukkan dalam pola dasar Rencana Pembangunan Lima Tahun Indonesia untuk tahap tahun-tahun berikutnya.<sup>10)</sup>

Apabila dikaitkan dengan pokok-pokok pikiran tersebut di atas maka pendidikan anak sejak dini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan, terlebih secara profesional. Selain itu pendidikan anak sejak dini juga merupakan salah satu sarana pembentukan manusia Indonesia yang paripurna. Manusia paripurna menurut Sutarjo Adisusilo dalam tulisan berjudul "Gambaran Manusia Indonesia Menurut Pancasila" yang disunting oleh Dick Hartoko dalam buku berjudul "Memanusiakan Manusia Muda" adalah manusia yang sesuai dengan gambaran Pancasila sebagai dasar negara, yaitu manusia yang integral, menyeluruh, dan semua totalitas yang disebut manusia dikembangkan sepenuhnya. Manusia paripurna adalah manusia yang terbentuk secara integral baik dalam dimensi horisontal maupun dalam dimensi vertikal (maksudnya antara kehidupan dunia dan akhirat).<sup>11)</sup>

10) B. Simandjuntak, SH, Drs. & I.L. Pasaribu, Dra, Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, Tarsito, Bandung, 1990 hal. 74 - 75

11) Dick Hartoko (Editor), Memanusiakan Manusia Muda, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990, hal 31

Pendidikan sejak dini pada umumnya dimulai dari keluarga dimana anak dibesarkan. Menurut Alex Lanur dalam tulisan berjudul "Dimensi Sosial" yang disunting oleh FX. Mudji Sutrisno dalam buku berjudul "Manusia Dalam Pijar-pijar Kekayaan Dimensinya", setiap orang dilahirkan dalam suatu keluarga atau batih. Oleh karena itu, sejak semula ia sudah dikelilingi oleh orang-orang lain, paling tidak, oleh orang tuanya sendiri. Ia berada bersama dan berhubungan dengan mereka pula. Ia mulai mengenali dan menemukan dirinya dengan pertolongan orang-orang lain. Ia bahkan menemukan orang-orang lain 'lebih dahulu' daripada dirinya sendiri. Semua itu terjadi dalam keluarganya.<sup>12)</sup> Karena itu situasi keluarga sangat besar peranannya dalam proses pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga setiap keluarga perlu membina dirinya menjadi wadah yang nyaman dan menyenangkan bagi anak dan dalam hal ini peran orang tua sangat diperlukan. Oleh karena itu sebagaimana disebutkan dalam Buku Panduan Penyuluhan Hukum Tentang Anak terbitan FK-PPAI, bahwa agar dapat mendidik anak sesuai dengan tuntutan zaman, orang tua harus mampu untuk membuka diri terhadap informasi-informasi dan pengetahuan yang dapat membantu mereka melaksanakan perannya secara efektif.<sup>13)</sup>

Semakin banyak wanita yang bekerja di luar rumah mengakibatkan semakin banyak lingkungan keluarga yang berubah oleh kehadiran orang lain, seperti sanak famili, pengasuh, pembantu, atau orang lain yang dibayar untuk membantu kelancaran urusan rumah tangga suatu keluarga. Karena itu orang tua perlu selektif dalam menerima kehadiran orang lain yang bukan sanak familinya karena orang lain tersebut dapat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. TPA sebagai lembaga profesional diharapkan akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak. Pengasuh atau perawat pada TPA memang orang di luar keluarga yang menggantikan peran ibu selama anak ditinggal bekerja, namun karena TPA telah memiliki dasar, tujuan, dan ketentuan yang jelas maka orang tua tak perlu khawatir untuk menitipkan anaknya. Selain memberi kesejahteraan anak berupa kebutuhan pokok anak seperti makan dan minum, TPA juga memberi pendidikan yang memadai seperti mengajak bermain secara edukatif, pelajaran tata krama, dan sebagainya yang semuanya termasuk pendidikan dini.

Pendidikan sejak dini melalui TPA dapat membantu Astra Citra Anak Indonesia yang merupakan pokok-pokok panduan dasar sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan anak Indonesia di seluruh tanah air dengan bahasa, cara, dan adat istiadat serta daya mampu masing-masing. Astra Citra Anak Indonesia

12) FX. Mudji Sutrisno, Manusia Dalam Pijar-pijar Kekayaan Dimensinya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993, hal 34.

dirumuskan, sebagai berikut : “Aku anak Indonesia, berjiwa Pancasila dan berwawasan nusantara : (1) Rajin beribadat; (2) Hormat bakti kepada orang tua dan guru; (3) Jujur dan cakap dalam membawakan diri serta peka akan seni; (4) Pandai membaca dan menulis serta rajin belajar dan bekerja; (5) Terampil penuh prakarsa, rajin berkarya mengejar prestasi dan berjiwa gotong royong; (6) Mandiri, penuh semangat, berdisiplin dan bertanggung jawab; (7) Sehat dan berhati riang, penuh keyakinan dan usaha menghadapi masa depan; (8) Cinta tanah air.

Makna Astra Citra Anak Indonesia merupakan amanat cita-cita bangsa bagi semua pihak agar memiliki kesatuan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan upaya dan kegiatan pembinaan dan pengembangan anak Indonesia untuk : (1) Membantu tumbuh kembang anak sehingga terbina suatu pribadi yang memiliki sikap dan perilaku Astra Citra Anak Indonesia; (2) Menyiapkan tenaga pembangunan yang tangguh dalam menghadapi tantangan zamannya; (3) Menumbuhkan kesadaran anggota keluarga, masyarakat, dan warganegara akan hak dan kewajibannya, sehingga mampu ikut berperan aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya dan kegiatan tersebut di atas akan membentuk anak agar berkembang menjadi manusia Indonesia yang utuh, yakni manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara Indonesia serta dapat berpartisipasi dengan sesamanya sesuai dengan peranan dan kemampuan masing-masing.<sup>14)</sup>

### **Gambaran Studi Kelayakan TPA di Setjen MPR/DPR RI**

Telah dikemukakan di atas bahwa rencana pendirian TPA di Setjen MPR/DPR RI selain dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai juga untuk memotivasi peningkatan efisiensi sumber daya manusia. Dengan adanya TPA diharapkan para pegawai (terutama pegawai wanita) bisa bekerja dengan tenang tanpa ada rasa khawatir atas keselamatan dan pertumbuhan serta perkembangan anak balitanya karena anak-anak mereka diasuh oleh orang-orang profesional. Dengan adanya TPA diharapkan para pegawai bisa bekerja dengan efisien dan efektif serta berkualitas.

Selain itu rencana pendirian TPA di Setjen MPR/DPR RI juga didukung oleh kesadaran bahwa suami isteri yang keduanya bekerja tetap menginginkan anak-anaknya dapat tumbuh kembang dengan wajar dan

baik secara lebih optimal dalam segi fisik, mental, serta spiritualnya yang terwujud dalam situasi antara lain : (1) Anak Balita diasuh dengan baik selama kedua orang tuanya bekerja; (2) Anak Balita memperoleh kebutuhan untuk perkembangan sosial kemasyarakatan dengan baik; (3) Rasa aman anak Balita akan berkembang secara optimal karena perhatian yang diberikan oleh ibu atau pengasuh lainnya adalah tepat, penuh kasih sayang dan kepercayaan; (4) Orang tua merasa lebih aman karena telah menitipkan anak Balitanya kepada pihak yang dapat dipercaya.

Studi kelayakan TPA di Setjen MPR DPR/RI dilakukan dengan langkah-langkah antara lain : (1) Pembentukan Panitia dengan Keputusan Sekjen DPR RI No. 206/Sekjen/1995 tentang Pembentukan Panitia Persiapan Pendirian Tempat Penitipan Anak Bagi Anggota/Keluarga Anggota DPR RI, dan Pegawai Setjen MPR/DPR RI, di Komplek Gedung MPR/DPR RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan - Jakarta; (2) Pembagian kerja panitia ke dalam tim-tim kecil untuk need assessment; (3) Studi kepustakaan dan dokumentasi serta wawancara dengan sumber-sumber terkait, diantaranya studi banding ke TPA BULOG, TPA DEPDIKBUD, dan TPA Manggala Wana Bakti di Jakarta; (4) Penjajagan khalayak sasaran melalui penyebaran kuesioner.

Setelah dilakukan penelitian penjajagan terhadap khalayak sasaran dan analisa hasil penelitian dengan menggunakan teori yang telah dikemukakan, maka tampak sekali ada kesenjangan antara teori dan kenyataan. Pentingnya pendidikan prasekolah sebagaimana dikemukakan dalam teori tidak tercermin dalam realita yang terjadi pada pegawai Setjen MPR/DPR RI, hal ini terutama terlihat pada hasil penelitian melalui kuesioner yang menunjukkan belum adanya minat yang berarti dari para responden untuk memanfaatkan TPA secara serius. Meskipun sebagian besar responden merasa pernah kesulitan untuk mendapatkan pengasuh anak Balita, namun keinginan untuk menitipkan anak Balitanya ke TPA belum terlihat dengan jelas. Banyak responden yang tidak menjawab tentang seberapa besar biaya yang sanggup mereka bayarkan, meskipun mereka setuju adanya TPA. Selain itu jumlah responden yang akan menitipkan anak Balitanya ke TPA setiap hari kerja amat sedikit (7 orang = 18,42%), sedang sebagian besar lainnya ingin menitipkan anaknya ke TPA hanya kadang-kadang saja.

### **Responden dan Sikapnya terhadap TPA**

Menurut data KP-4 tahun 1994 yang diperoleh dari Bagian Kepegawaian Setjen MPR/DPR RI, jumlah keseluruhan pegawai adalah 1206 orang terdiri dari 976 (81,18%) laki-laki dan 227 (18,82%) wanita.

Pegawai laki-laki yang sudah menikah adalah 844 orang (86,21%) dan yang tidak menikah 135 orang (13,79%). Jumlah keseluruhan isteri adalah 824 orang, terdiri dari 753 orang (91,38%) wanita usia subur dan 71 orang (8,62%) bukan usia subur. Dari segi pekerjaan, 686 orang isteri (82,25%) adalah Ibu Rumah Tangga, 76 orang (9,11%) PNS dan 72 orang (8,64%) karyawan swasta.

Pegawai wanita yang sudah menikah adalah 154 orang (67,84%) dan 73 orang lainnya (32,16%) tidak menikah. Dari pegawai wanita yang sudah menikah, 135 orang (87,66%) termasuk kategori usia subur dan 19 orang (12,34%) bukan kelompok usia subur. Sebagian besar suami mereka (97 orang = 62,99%) adalah karyawan swasta, 51 orang (33,11%) PNS dan 6 orang (3,90%) tidak bekerja.

Dari seluruh pegawai Setjen MPR/DPR RI diperoleh data jumlah anak yaitu 2149 orang yang terdiri 1733 orang (80,64%) anak berusia di atas 5 tahun, dan 416 orang (19,36%) anak Balita. Sedangkan dari pegawai wanita diperoleh data tentang jumlah anak mereka yaitu 217 orang anak yang terdiri dari 145 orang (66,82%) anak berumur di atas 5 tahun dan 72 orang (33,18%) anak Balita.

Dengan demikian dapat disimpulkan : (1) Sebagian besar pegawai Setjen MPR/DPR RI adalah laki-laki; (2) Sebagian besar pegawai wanita termasuk dalam kategori usia subur; (3) Sebagian besar isteri pegawai Setjen MPR/DPR RI adalah Ibu Rumah Tangga dan termasuk kategori usia subur; (4) Sebagian besar anak dari pegawai Setjen MPR/DPR RI adalah anak berusia di atas 5 tahun dan hanya sebagian kecil anak yang berusia di bawah 5 tahun. Demikian juga anak dari pegawai wanitanya.

Menurut hasil kuesioner, ada 67 responden yang semuanya telah menikah, terdiri dari 25 orang (37,31%) laki-laki dan 42 orang (62,69%) wanita. Sebagian besar responden adalah golongan Ila-IId (32 orang = 47,76%) dan golongan IIIa-IIIId (26 orang = 38,80%).

Pegawai wanita menjadi perhatian utama karena diasumsikan mereka akan memiliki kepentingan dengan adanya TPA, sedangkan pegawai laki-laki juga diberi kuesioner dengan alasan, mereka yang isterinya bekerja sewaktu-waktu juga harus bertanggung jawab atas anak Balitanya apabila tak ada pengasuh sehingga mereka pun akan memanfaatkan jasa TPA. Keseluruhan responden wanita merupakan 27,27% dari jumlah keseluruhan pegawai wanita di Setjen MPR/DPR RI.

Jumlah isteri pegawai yang tidak bekerja adalah 16 orang (64,00%) dan hanya 9 orang (36,00%) yang bekerja. Isteri yang bekerja, 4 orang (44,44%) adalah PNS dan 5 orang (55,56%) karyawan swasta yang semuanya termasuk dalam kategori usia subur dan sebagian besar mereka (88,90%) bekerja secara penuh waktu (full time).

Sebagian besar responden (57 orang = 85,07%) sudah mempunyai

anak dengan jumlah anak tiga orang atau lebih (23 orang = 40,35%). Selebihnya, 18 orang (31,57%) responden mempunyai satu orang anak dan 16 orang (28,08%) memiliki dua orang anak.

Responden yang memiliki anak, sebagian besar memiliki anak Balita (38 orang = 66,67%). Sebagian besar responden ini memiliki satu orang anak Balita (35 orang = 92,11%). Hanya ada 3 orang (7,89%) responden yang memiliki dua anak Balita. Dengan demikian maka dari keseluruhan responden terdapat 41 orang anak Balita.

Sebagian besar responden (24 orang = 63,16%) menyatakan pernah mengalami kesulitan mendapatkan pengasuh anak. Sebagian besar mereka menitipkan anak Balitanya kepada famili (15 orang = 62,49%) dan sebagian kecil menitipkan ke tetangga terdekat, TPA atau membawanya ke kantor.

Terlepas dari mempunyai atau tidaknya anak, sebagian besar responden (58 orang = 86,56%) menyatakan setuju didirikannya TPA di Komplek Gedung MPR/DPR RI. Mereka yang setuju TPA dan berminat menitipkan anaknya, sebagian besar menginginkan fasilitas TPA berupa : Pengasuhan anak yang profesional, jaminan makan dan minum anak, alat permainan yang edukatif, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Sebagian besar yang setuju TPA adalah mereka yang telah mempunyai anak (38 orang = 88,37%).

Responden yang setuju dan berminat menitipkan anak Balitanya sebagian besar (28 orang = 73,69%) akan memanfaatkan TPA hanya kadang-kadang saja. Sedangkan responden yang akan menitipkan anak Balitanya setiap hari kerja hanya ada 7 orang (18,42%). Persentase terkecil (3 orang (7,89%) adalah responden yang akan menitipkan anaknya 2-3 kali dalam seminggu.

Tentang biaya penitipan anak, sebagian besar responden (22 orang = 51,16%) berpendapat bahwa biaya yang idial adalah Rp. 2000,00 s/d Rp. 3.000,00 . Sedangkan kesanggupan mereka untuk membayar juga sebesar Rp. 2000,00 s/d Rp. 3000,00, (19 orang = 44,19%). Selain itu jumlah responden yang tidak menjawab juga memiliki persentase yang hampir sama yaitu 18 orang (41,86%).

Dari data tersebut akhirnya dapat dianalisa bahwa kemungkinan pendirian TPA di Komplek Gedung MPR/DPR RI akan menghadapi kendala antara lain kesanggupan membayar para calon konsumen, mengingat TPA memerlukan biaya operasional sehari-hari yang cukup besar. Banyaknya responden yang tidak menjawab (18 orang = 41,86%) juga menunjukkan kurang respeknya mereka terhadap TPA. Mereka menyatakan asal setuju saja tanpa memberi keterangan lebih lanjut.

Dengan demikian diperkirakan pemanfaatan TPA akan tidak optimal karena sebagian besar responden akan menitipkan anaknya hanya

kadang-kadang saja. Orang yang akan menitipkan anaknya setiap hari kerja hanya 7 orang, padahal kapasitas minimal bagi suatu TPA adalah sekitar 15 orang anak. Dengan demikian keberadaan TPA di Komplek Gedung MPR/DPR RI akan kurang efektif karena peminatnya kurang.

Setelah melihat hasil penelitian di atas maka pertanyaan baru yang muncul adalah : Mengapa para pegawai tidak memiliki minat yang serius untuk memanfaatkan TPA ? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu ada penelitian baru yang didukung oleh teori serta data yang valid.

### **Kesimpulan dan Saran**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas adalah : (1) Meskipun TPA secara teoritis baik, namun belum ada minat yang berarti dari pegawai Setjen MPR/DPR RI untuk memanfaatkannya secara optimal. Karena itu pendirian TPA di Komplek Gedung MPR/DPR RI belum mendesak; (2) Kesimpulan pertama tersebut bisa ditinjau kembali sesuai perkembangan, karena bukan tidak mungkin akibat perubahan keadaan maka minat pegawai Setjen MPR/DPR RI terhadap TPA meningkat pada masa mendatang. Apalagi kalau dihubungkan dengan prediksi jumlah pegawai (termasuk pegawai wanita) Setjen MPR/DPR RI tahun 2000 adalah 2.145 orang sehingga permasalahan pengasuhan anak Balita mereka juga perlu mendapat perhatian lebih serius.

Selanjutnya dari penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah : Perlu penelitian lebih lanjut tentang minat pegawai Setjen MPR/DPR RI terhadap TPA, ditinjau dari berbagai sudut pandang.

### **Daftar Pustaka**

1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990.
2. Charles Zastrow & Karen K. Kirst-Ashman, *Understanding Human Behavior and the Social Environment*, Nelson-Hall Publishers, Chicago, 1989.
3. Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1993.
4. Keppres RI No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Right of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
5. SK Menteri Sosial RI No : 47/HUK/1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. SK Kakanwil Depsos DKI Jakarta tentang Pedoman Tata Cara Pengembangan dan Pengelolaan Taman Penitipan Anak di Wilayah DKI Jakarta.

7. EM. K. Kaswardi (Penyunting), Pendidikan Nilai Tahun 2000, Komisi Pendidikan KWI/MNPK dan Gramedia Widiasarana, Jakarta, 1993.
8. B. Simanjuntak, SH, Drs. & I.L. Pasaribu, Dra., Membina dan Mengembangkan Generasi Muda, Tarsito, Bandung, 1990.
9. Dick Hartoko (Editor), Memanusiakan Manusia Muda, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990.
10. FX. Mudji Sutrisno, Manusia Dalam Pijar-pijar Kekayaan Dimensinya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1993.
11. Buku Panduan Penyuluhan Hukum tentang Anak, Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FK-PPAI), Jakarta, 1993.

